



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

A

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 26 Agustus 2016 No. 68

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PD PROVINSI DKI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : NOVIADI WIDJAYA, S.E.
- 2. Jabatan : PJS. KEPALA DIVISI - MANAJEMEN KEUANGAN DAN AKUNTANSI - PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
- 3. Alamat Kantor : Jl. MH. THAMRIN NO. 59, JAKARTA PUSAT
- 4. Tanggal Pelaporan : 27 April 2015

II. DATA HARTA

- A. HARTA TIDAK BERGERAK** Rp. 0
(TANAH & BANGUNAN)
- B. HARTA BERGERAK**
 - a. ALAT TRANSPORTASI** Rp. 130.000.000
DAN MESIN LAINNYA
 - 1. Mobil, merk NISSAN SERENA, tahun pembuatan 2010, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2015 nilai jual Rp.130.000.000
 - b. PETERNAKAN,** Rp. 0
PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN,
KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA
 - c. HARTA BERGERAK** Rp. 3.300.000
LAINNYA

- LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH, perolehan dari tahun 2005 sampai dengan 2014 dengan nilai jual Rp.3.300.000

C. SURAT BERHARGA Rp. **0**

D. GIRO DAN SETARA KAS Rp. **43.039.156**

LAINNYA

- Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.43.039.156

E. PIUTANG Rp. **30.117.642**

- Piutang dalam bentuk PINJAMAN UANG sebesar Rp.30.117.642

TOTAL HARTA (II) Rp. **206.456.798**

III. HUTANG Rp. **289.317.939**

- Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG sebesar Rp.282.500.513

- Hutang dalam bentuk KARTU KREDIT sebesar Rp.6.817.426

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) Rp. **-82.861.141**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

